

KEPERCAYAAN DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Haryani

Syafruddin

Much_syafruddin@yahoo.co.id
Universitas Diponegoro Semarang
Jl Airlangga 56 Semarang

ABSTRACT

This study examines empirically the impact of the antecedent factors on the use of regulation of the budget systems and managerial performance by local government. According to the work of motivational and expectations theory, theoretical framework is designed to enable an assessment of the antecedent factors on the use of regulation of the budget systems and managerial performance. The study is based on data collected from managers and employees involved in establishing budget in each of subunit in local government, namely Batang. In apart of the results support the hypotheses and demonstrate the consequences of the antecedent factors power on use of regulation of the budget systems and managerial performance by local government.

Key Words: Managerial Performance, Use of Regulation of the budget systems, Ease of Use, Usefulness, Anxieties, and Attitude

ABSTRAK

Penelitian ini menguji secara empiris dampak dari faktor-faktor antesenden pada penggunaan regulasi sistem anggaran dan kinerja manajerial oleh pemerintah setempat. Menurut motivasi kerja dan teori harapan, kerangka teoretis yang dirancang untuk memungkinkan penilaian t faktor antesenden pada penggunaan regulasi sistem anggaran dan kinerja manajerial. Penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari para manajer dan karyawan yang terlibat dalam pembentukan anggaran di setiap subunit dalam pemerintahan lokal, yaitu Batang. Hasil mendukung hipotesis dan menunjukkan konsekuensi dari kekuatan faktor antesenden pada penggunaan regulasi sistem anggaran dan kinerja manajerial oleh pemerintah setempat.

Kata Kunci: Kinerja Manajerial, Penggunaan Peraturan sistem anggaran, Kemudahan Penggunaan, Kegunaan, Kekuatan, Sikap

PENDAHULUAN

Isu sentral dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa dan bagaimana yang berpengaruh terhadap proses implementasi (kesuksesan) Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Argumentasi yang mendukung penetapan isu-isu sentral ini adalah bahwa proses sentralisasi menjadi desentralisasi dalam Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia sangat bergantung pada perubahan perilaku orang yang terlibat dalam proses tersebut, khususnya yang mengimplementasikan perubahan paradigma Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan paradigma ini, mengharuskan adanya perubahan cara berfikir, berkeyakinan dan bertindak menyangkut proses implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan menyangkut kegiatan pelayanan publik secara umum.

Subjek penelitian yang akan diinvestigasi adalah perilaku aparat pemerintah daerah yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara khusus adalah menyangkut aspek hubungan sebab (kausalitas) perilaku aparat tersebut. Aspek hubungan sebab (kausalitas) perilaku meliputi (a) tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (b) sikap (*attitude*), (c) perilaku/ *behavior* (tingkat implementasi Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) aparat pemerintah. Lebih lanjut tingkat kepercayaan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari aspek perilaku berikut, (1) tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan (4) tingkat kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedang tingkat implementasi (perilaku) aparat selama proses Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari aspek perilaku berikut, (1) tingkat kepuasan kerja aparat dengan adanya aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan (2) tingkat kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah dengan adanya aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penelitian ini difokuskan pada aturan menyangkut Keuangan Daerah dan Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui ada dua aturan pokok menyangkut Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Th 2004) dan perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah (UU No.33 Th 2004).

Model konseptual dasar yang dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas dasar teori tindakan logis (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori tersebut memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavioural intentions*). Keinginan berperilaku seseorang itu sendiri ditentukan oleh sikap orang tersebut terhadap perilaku dan juga ditentukan seperangkat norma-norma subjektif tentang perilaku yang dimaksud. Sikap seseorang terhadap perilaku spesifik merupakan fungsi kepercayaan (*beliefs*) dan evaluasi, dan bahwa norma-norma subjektif seseorang merupakan fungsi kepercayaan normatif dan motivasi untuk memenuhi norma-norma tersebut.

Model teori tindakan logis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model penelitian ini. Argumentasi penggunaan model ini adalah bahwa model penelitian teoritis tersebut bisa menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemerintah daerah menerima seperangkat peraturan Otonomi Daerah yang demikian luas, kompleks dan membutuhkan kemampuan dan skills teknis tertentu untuk memahami dan menerapkan dalam praktik kerja sehari-hari mereka.

METODE PENELITIAN

Ada berbagai variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini. Variabel atau faktor Kemudahan Penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan 11 item pertanyaan dengan menggunakan 5 poin Skala Likert. Skala pengukuran ini diadopsi dari item-item yang dikembangkan, diuji, dan digunakan dalam penelitian oleh Davis, 1989. Variabel atau faktor lainnya, yaitu Kegunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur atas dasar 6 item pertanyaan dengan menggunakan 5 poin skala Likert yang juga dikembangkan oleh Davis, 1989. Variabel atau faktor Kebingungan Aparat Pemda dalam memahami dan mengaplikasikan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diukur atas dasar ukuran atau skala yang dikembangkan dan digunakan oleh penelitian Howard, 1986. Pengembangan dan penggunaan alat ukur penelitian terhadap variabel ini adalah 6 item pertanyaan dengan 5 poin skala Likert. Variabel atau faktor berikutnya adalah Sikap Aparat Pemda terhadap penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasar metode dan instrumen yang dikembangkan dan

digunakan oleh Hatcher dan Diebert (1987), penelitian ini menggunakan 7 (tujuh) item pertanyaan dengan 5 poin skala Likert. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini, peneliti mengajukan pertanyaan tentang berapa tahun atau berapa bulan aparat Pemda mengetahui dan mengaplikasikan kedua aturan dalam pekerjaan mereka. Variabel Kinerja Pekerjaan yang diukur atas dasar cara yang dikembangkan dan digunakan oleh Brownell dan Dunk, 1991. Atas dasar penelitian yang dilakukan Brownell dan Dunk ini, instrumen jumlah item pertanyaan ada 2 item pertanyaan yang juga dengan 5 poin skala Likert.

Teknik analisis data adalah model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling* selanjutnya disingkat dengan SEM). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS versi 13.0) dan *Analysis of Moment Structure* (AMOS versi 6.0). Analisis data dengan SEM dipilih karena analisis statistik ini merupakan teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan saling ketergantungan secara simultan (Hair *et al.*, 1998). Selain itu, metode analisis data dengan SEM memberi keunggulan dalam menaksir kesalahan pengukuran dan estimasi parameter.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hubungan Penggunaan Aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Pekerjaan

Semakin tinggi frekuensi aparat pemda dalam menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, semakin tinggi pula orang tersebut. Dalam hal ini tingkat

penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sebagai jumlah waktu yang digunakan dalam proses penyusunan APBD model baru. Argumentasi seperti ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh King (1978) Agho (1993), walaupun dalam konteks yang lain.

Kuantitas dan kualitas kerja yang diselesaikan seseorang secara umum merupakan komponen kunci dalam mengestimasi kinerja pekerjaan seseorang (Irving et al., 1986; Stumpf dan Dawley, 1981). Penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang relatif baru akan merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja seseorang. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell, 1991; Pentland, 1989; Williamson dan Pence, 1989; dan Eveland dan Bikson, 1987; maka dapat diprediksi bahwa semakin tinggi penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemda, maka semakin tinggi pula kinerja pekerjaan aparat pemda tersebut.

H1: Tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Hubungan Sikap terhadap Aturan dan Kinerja Pekerjaan

Dalam penelitian ini, sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai perasaan umum aparat pemda untuk lebih menyukai atau lebih tidak menyukai terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka, khususnya dalam penyusunan APBD. Definisi ini diturunkan dari definisi yang telah dirumuskan peneliti terdahulu seperti, Allport, 1967; Fishbein dan Ajzen, 1975;

dan Triandis, 1980. Dalam penelitian ini diprediksi bahwa sikap aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara positif akan meningkatkan aparat pemda tersebut.

Jika seseorang dalam hal ini aparat pemda menyimpulkan bahwa pada tingkat tertentu, manfaat potensial penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pekerjaan mereka (penyusunan APBD) melebihi *cost* yang mereka keluarkan, maka mereka akan secara positif bersikap terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Dampak atau konsekuensi lebih lanjut dari ini adalah meningkatnya kinerja pekerjaan aparat pemda tersebut. Dengan sikap yang positif, maka kinerja pekerjaan aparat pemda juga menjadi semakin positif atau meningkat. Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nevell, 1991; dan Bhagat, 1983.

H2: Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada kinerja pekerjaan aparat pemerintah daerah.

Hubungan Sikap terhadap Aturan dan Penggunaan Aturan

Ternasuk dalam penelitian-penelitian awal yang menginvestigasi hubungan antara sikap dan perilaku pemakai atau pengguna sesuatu adalah Lucas, 1975; Schewe, 1976; Robey, 1979; Ginzberg, 1981; dan Ives et al., 1983. Penelitian mereka ini menunjukkan dan menyimpulkan bahwa hubungan antara kedua faktor adalah kuat dan signifikan. Oleh karena inilah maka dalam penelitian ini diprediksi bahwa sikap aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan secara positif berpengaruh terhadap peningkatan dan optimisme aparat pemda dalam menggunakan dan

menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

H3: Sikap aparat pemerintah daerah terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hubungan Kebingungan terhadap Aturan dan Kinerja dan Penggunaan

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berusaha menjelaskan kebingungan seseorang dalam konteks khusus, yaitu kebingungan aparat pemda dalam mempersepsikan, memahami, dan menerapkan/menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang mengalami tingkat ketidak-mudahan atau keprihatinan terhadap rintangan penggunaan aturan Otda yang adalah tidak proporsional atau tidak cocok dengan ide yang terkandung dalam aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis kebingungan seperti ini adalah perasaan keprihatinan yang dalam, ketidak proporsionalan terhadap akibat yang muncul dari penggunaan aturan (Spielberg, 1966; Howard, 1986). Dari situasi seperti ini maka dapat diprediksi bahwa semakin menungkat kebingungan aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka semakin tinggi pula sikap daya tolak aparat pemda terhadap penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebingungan seseorang terhadap sesuatu dapat dimanifestasikan dalam tingkat ketakutan yang tidak realistis dan keprihatinannya. Intensitasnya bisa sangat beragam, berfluktuasi selama kurun waktu, dan mengingkat dalam rangka merespon

rangsangan khusus (dalam penelitian ini adalah keberadaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Kegunaan (secara esensial adalah kepercayaan terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) merupakan kepercayaan yang cukup kuat sebagai bagian dari individu untuk membujuk atau mendorong bahwa orang tersebut akan tetap atau tidak menggunakan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar argumentasi atau definisi ini maka dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mepersepsi, memahami dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD.

Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 4 dan 5 sebagai berikut.

H4: Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Aparat Derah.

H5: Kebingungan aparat pemerintah daerah terhadap aturan berpengaruh negatif terhadap Penggunaan Aparat Derah terhadap Aturan.

Hubungan Kemudahan Penggunaan Aturan dan Penggunaan Aturan

Erat hubungannya dengan uraian yang ada di atas, penelitian juga memprediksi bahwa tingkat kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan mengarahkan atau menghasilkan tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga semakin tinggi. Argumentasi yang mendukung ini adalah bahwa mekanisme kunci bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara langsung terhadap perilaku adalah kemanjuran atau kemujaraban diri sendiri

(self-efficacy). Sesuai dengan penelitian Bandura (1982), kemandirian atau kemujaraban diri sendiri (self-efficacy) adalah judgment atau perkiraan seseorang bagaimana orang tersebut dapat dengan mengeksekusi atau menjalankan tindakan tertentu yang dibutuhkan atau sesuai dengan situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini adalah perkiraan aparat pemda dalam mengeksekusi atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar uraian ini dapat dijelaskan dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

H6: Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

Kemudahan Penggunaan Aturan dan Kinerja

Konsisten dengan uraian yang ada pada hipotesis 6 di atas, maka dapat diprediksi bahwa kemudahan tentang penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan pemerintah akan mendorong meningkatnya sikap positif aparat pemda terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, juga dapat diantisipasi dan diprediksi bahwa kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang berkebalikan terhadap kebingungan aparat pemda dalam mempersepsi, memahami dan menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kerja penyusunan APBD. Dari semua uraian di sub bagian ini rumusan hipotesis 7 adalah:

H7: Kemudahan penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada sikap aparat pemerintah daerah terhadap Kinerja.

Hubungan Kegunaan Aturan dan Penggunaan Aturan

Sesuai dengan karya penelitian Davis (1989) dan Adams (1992), kemudahan penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sesuatu tersebut, maka orang ini merasa akan meningkatkan kebebasannya dalam berusaha atau bekerja. Sedangkan penggunaan sesuatu didefinisikan sebagai derajat ketika seseorang percaya bahwa penggunaan sesuatu akan meningkatkan kinerja pekerjaan orang tersebut. Mengikuti penelitian Hill et al., 1987; Robey, 1979; dan Vroom, 1964, maka dalam konteks aparat pemda dan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diprediksi bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan atau berpengaruh secara positif terhadap tingkat penggunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

H8: Kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada tingkat penggunaan/penerapan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah daerah.

Hubungan Kegunaan Aturan dan Kinerja

Untuk memperkirakan apakah aparat pemda akan menggunakan atau menerapkan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, juga tergantung pada apakah aparat pemda tampaknya mempunyai sikap positif terhadap aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah atau tidak. Jika aparat pemda berpegang pada sikap positif bahwa aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah aturan yang berguna dan dengan mudah diterapkan, maka dapat diperkirakan bahwa kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan semakin meningkatkan sikap positif aparat pemda tersebut.

H9: Tingkat kegunaan aturan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara positif pada sikap aparat pemerintah daerah terhadap Kinerja.

Adapun data jumlah responden diambil sebagai subjek penelitian ini adalah tampak seperti berikut. Jumlah sampel penelitian sebanyak 348 responden. Profil atau karakteristik dari 348 responden penelitian yang meliputi gender, tingkat pendidikan, lama bekerja, dan lama menduduki jabatan disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Berdasarkan gender, sebahagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 222 (63,80 persen) dan perempuan sebanyak 126 (36,20 persen). Tingkat pendidikan responden sebahagian besar adalah Diploma yaitu sebanyak 233 atau 67,00 persen, Strata Dua dan Strata satu sebanyak 85 (24,40 persen), dan sebanyak 30 atau 8,60 persen yang berpendidikan di bawah Diploma.

Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil pengukuran variabel kinerja menunjukkan skor sesungguhnya terletak pada kisaran teoritis yaitu 11-48, dengan skor rata-rata 30,66 dan standar deviasi 8,06. Pengukuran variabel penggunaan menunjukkan skor sesungguhnya terletak pada kisaran skor teoritis yaitu berkisar antara 9-28 dengan skor rata-rata 18,08, dan standar deviasi 4,84. Selanjutnya

skor rata-rata sebesar 18,08 yang hampir sama dengan skor rata-rata total teoritis sebesar 18 (yaitu 6 dikali 3) mengindikasikan secara rata-rata responden kadang-kadang menggunakan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Kisaran teoritis variabel *sikap* adalah 16-80, dimana skor yang lebih rendah mengindikasikan *sikap* negatif terhadap peraturan dan skor yang lebih tinggi mengindikasikan *sikap* positif. Hasil pengukuran yang menunjukkan kisaran sesungguhnya variabel *sikap* adalah 22-74 dengan skor rata-rata 49,09 dan standar deviasi 10,81. Skor rata-rata sebesar 49,09 yang sedikit lebih besar dari skor rata-rata total teoritis sebesar 48 (16 dikali 3) mengindikasikan secara rata-rata responden cenderung memiliki *sikap* positif. Hasil pengukuran untuk kebingungan menunjukkan kisaran sesungguhnya adalah 8-29 dengan rata-rata 18,08 dan standar deviasi 4,96; untuk kemudahan penggunaan kisaran sesungguhnya adalah 7-28 dengan rata-rata 17,85 dan standar deviasi 4,13, dan untuk kegunaan kisaran sesungguhnya adalah 8-29 dengan rata-rata 17,85 dan standar deviasi 4,61. Hasil pengukuran semua variabel mengindikasikan masing-masing dimensi adalah bervariasi.

Pengujian *Non-Response Bias*

Responden yang digolongkan sebagai kelompok yang memberi respon lebih awal adalah responden yang mengembalikan kuesioner sampai batas akhir Maret 2009, dan responden yang digolongkan sebagai kelompok paling akhir adalah responden yang mengembalikan kuesioner setelah akhir Maret sampai dengan akhir April 2009. Hasil pengujian *non-response bias* dengan uji-t.

Hasil pengujian dengan uji-t menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor kinerja. Penggunaan, kebingungan, kem. pengg., dan kegunaan antara kedua kelompok

responden tersebut ($p > 0,05$). Berdasarkan uji-t, disimpulkan data yang digunakan pada penelitian ini bebas dari *non-response bias*.

Hasil pengamatan atas *assesment of normality* untuk model struktural kinerja menunjukkan tidak terdapat nilai C.R yang lebih besar dari $\pm 2,58$ untuk semua variabel tunggal (indikator penelitian). Selanjutnya, hasil uji normalitas *multivariate* untuk model struktural kinerja menunjukkan nilai C.R kurtosis masing-masing sebesar 2,354 dan 1,952. Nilai tersebut belum melampaui nilai kriteria yang digunakan yaitu $\pm 2,58$ (Ghozali, 2008). Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan data penelitian terdistribusi secara normal baik secara *univariate* maupun *multivariate*. Dengan demikian disimpulkan asumsi normalitas data secara *univariate* maupun *multivariate* dipenuhi. Evaluasi terhadap *multivariate outliers* dilakukan dengan memperhatikan nilai *mahalanobis distance*. Nilai χ^2 untuk model struktural kinerja adalah $(50, 0,001) = 86,66$. Hal ini berarti semua kasus yang mempunyai nilai *Mahalanobis distance* yang lebih besar dari 88,66 untuk model struktural kinerja. Hasil pengamatan untuk model struktural kinerja menunjukkan nilai *Mahalanobis distance* teratas untuk masing-masing model struktural adalah 67,888. Nilai *Mahalanobis distance* ini berada dibawah nilai χ^2 untuk masing masing model yaitu model struktural kinerja ($67,888 < 88,66$). Berdasarkan nilai *Mahalanobis distance* disimpulkan tidak terdapat *multivariate outliers* pada data penelitian ini.

Asumsi multikolinieritas mengharuskan tidak adanya korelasi tinggi atau sempurna antara variabel-variabel independen. Nilai korelasi antara konstruk yang tidak diperbolehkan adalah sebesar 0,90 atau lebih (Ghozali,2008). Hasil pengamatan terhadap korelasi antara konstruk menunjukkan tidak terdapat korelasi yang mendekati nilai 0,90. Sebagai rangkuman hasil

pengujian atas normalitas data, data *outlier*, dan multikolinieritas menunjukkan data penelitian ini memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan dengan analisis data menggunakan model persamaan struktural.

Hasil analisis faktor konfirmatori terhadap konstruk penelitian menunjukkan model pengukuran penelitian ini memiliki indeks-indeks fit yang baik. Hasil analisis faktor konfirmatori juga menunjukkan indikator-indikator yang mengukur konstruk memiliki validitas konvergen (*convergent validity*) yang baik. Hal ini ditunjukkan melalui nilai loading faktor indikator masing-masing konstruk di atas 0,50 (Ghozali; 2008).

Menurut Ghozali (2008), selain nilai loading faktor ukuran validitas konstruk lainnya adalah reliabilitas konstruk (*construct reliability*), *variance extracted* dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Tingkat reliabilitas suatu konstruk yang dapat diterima secara umum adalah nilai *Construct Reliability* lebih besar dari 0,7 [Ghozali, 2008].

Validitas konvergen suatu konstruk dapat juga dinilai dengan menghitung rata-rata varians yang diekstraksi (*avarage varianced extracted* atau AVE). *Variance extracted* memperlihatkan jumlah varians dari indikator yang diekstraksi oleh variabel bentukan yang dikembangkan. Nilai AVE yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator itu telah mewakili secara baik variabel bentukan yang dikembangkan. Angka yang direkomendasikan untuk AVE adalah lebih besar dari 0,5 ($AVE > 0,50$) [Ghozali, 2008].

Hasil perhitungan *construct reliability* dan AVE masing-masing konstruk disajikan pada tabel 4. Tampak pada tabel 4 semua konstruk penelitian memiliki nilai *consrtuct reliability* dan AVE yang sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan yaitu di atas 0,70 dan 0,50 (Ghozali,2008). Hal ini menunjukkan semua konstruk memiliki validitas konvergen yang baik.

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur di konstruk-konstruk berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas diskriminan dievaluasi lewat perbandingan akar kuadrat AVE dengan korelasi antara konstruk-konstruk berpasangan. Kriteria yang digunakan adalah nilai akar kuadrat dari AVE seharusnya melebihi korelasi antar pasangan konstruk (Ghozali 2008).

Model Persamaan Struktural Kinerja

Evaluasi terhadap kesesuaian yang baik model persamaan struktural kinerja dilakukan dengan memperbandingkan nilai indeks-indeks fit yang dihasilkan dari model dengan indeks-indeks fit yang direkomendasikan seperti yang disajikan pada tabel 6. Tampak pada tabel 6, hasil pengujian Chi-square sebesar 810,247 dengan probabilitas 0,432 menunjukkan model sangat fit. Kecuali indeks fit untuk AGFI yang berada sedikit di bawah kriteria yang direkomendasikan, nilai kriteria fit lainnya juga sesuai dengan yang direkomendasikan. Berdasarkan evaluasi terhadap indeks-indeks fit disimpulkan bahwa model persamaan struktural kinerja fit dengan data empiris.

Nilai-nilai koefisien regresi (*standardized estimated*), *standar error* (S.E), *critical ratio* (C.R), dan taraf signifikansi (probabilitas) yang menunjukkan hubungan kausalitas variabel yang dihipotesiskan yang diestimasi dari model persamaan structural. Terdapat enam jalur yang signifikan pada taraf nyata sebesar 0,05 atau di bawah 0,05 ($\leq 0,05$). Jalur-jalur yang signifikan adalah jalur dari *sikap* ke Penggunaan, jalur dari kegunaan ke Penggunaan, jalur dari *sikap* ke kinerja pekerjaan, jalur dari kebingungan ke kinerja pekerjaan, jalur dari kegunaan ke kinerja pekerjaan dan jalur dari Penggunaan ke kinerja pekerjaan. Tiga jalur lainnya ditemukan tidak signifikan yaitu jalur dari kebingungan ke

Penggunaan, jalur dari kemudahan penggunaan ke Penggunaan, dan jalur dari kemudahan penggunaan ke kinerja pekerjaan. Selanjutnya model memberikan 23,2% varian di konstruk Penggunaan dan 26,3% varian di konstruk kinerja pekerjaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari semua uraian dapat disimpulkan bahwa 9 hipotesis telah dikembangkan atas dasar teori tertentu. Namun berdasarkan pada tabel 8 dapat didimpulkan bahwa ada 5 hipotesis yang signifikan dengan nilai probabilitas kesalahan dibawah atau sama dengan 0,05. Dengan demikian 3 hipotesis tidak signifikan. Makna dari uji hipotesis-hipotesis ini adalah bahwa secara umum berbagai faktor harus dipertimbangkan ketika, baik regulator maupun operator (pengimplementasi) peraturan perundang-undangan tentang manajemen dan akuntansi keuangan daerah akan menerapkannya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Dari berbagai faktor yang tidak signifikan berperan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja adalah faktor kebingungan dan faktor kemudahan para aparat pemerintah. Makna dari temuan ini adalah bahwa memang ada beberapa kesulitan pemahaman dan pengimplementasian oleh aparat pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai peraturan dalam menjalankan tugasnya. dalam hal-hal tertentu kemungkinan besar, aparat ini kemudian ‘menggampangkan’ peraturan tersebut, hingga faktor atau variabel kemudahan ini menjadi tidak signifikan dalam meningkatkan penggunaan dan kinerja aparat pemerintah daerah.

Saran

Riset ini terbatas hanya pada aparat di sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Pemerintah Daerah Batang. Untuk itu perluasan di berbagai kabupaten, kota kemungkinan besar akan membawa manfaat [penelitian yang lebih besar. Selain itu berbagai faktor atau variabel bisa jadi merupakan variabel yang lebih kuat berpengaruh terhadap penggunaan dan kinerja aparat pemerintah daerah, misal faktor kultur organisasional di masing-masing daerah, atau bahkan di masing-masing unit kerja dalam sebuah kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D.A., R.R. Nelson, and P.A. Todd, 1992, *Perceived usefulness, ease of use, and information technology: A replication*, MIS Quarterly 16, 227-247.
- Agho, A.O., C.W. Mueller, and J.L. Price, 1993, *Determinants of employee, job satisfaction: An empirical test of a causal model*, Human Relations, 46, 1007-1027.
- Allport, G.W., 1967, The historical background of modern social psychology, in: C. Murchison, ed., Handbook of sociology (Clak University Press, Wocester)
- Bandura, A., 1982, Self-efficacy mechanism in human agency, *American Psychologist* 37, 122-147.
- Bhagat, R.S, 1983, Effects of stressful life events on individual performance effectiveness and work adjustment processes within organizational settings: A research model, *Academy of Management Review* 8,
- Brownell, P. and A.S. Dunk, 1991. Task uncertainty and its interaction with budgetary participation and budget emphasis; Some methodological issues and empirical investigation. *Accounting Organization and Society* 16. 693-703.
- Chenhall, R.H. and P. Brownell, 1988. The effect of participative budgeting on job satisfaction and performance: Ambiguity as an intervening variable, *Accounting Organization and Society* 13, 225-233.
- Davis, F.D., 1989. *Perceived Usefulness, perceived ease of use, and user acceptance information technology*, MIS Quarterly 13, 319-340.
- Davis, F.D., R.P. Bagozzi, and P.R. Warshaw, 1989, *User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models*, *Management Science* 35, 982-1003.
- Eveland, J.D. and T.K. Bikson, 1987. *Evolving electronic communication networks: An empirical assestment*, *Office: Technology ang People* 3, 103-128.
- Fishbein, M. and I. Ajzen, 1975, *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and reserch* (Addison-Wesley, Reading, MA).
- Ginzberg, E., 1982. *The mechanization of work: Review of the macro impact of technology*, *Scientific American* 247, 39-47.
- Ginzberg, M.J., 1981, *Early diagnosis og MIS implementation failure: Promising result and unanswered questions*, *Management Science* 27, 459-478.
- Hatcher, M.E. and C. Coats, 1984, *A scale for measuring the acceptance of micro computers in the office at Sheller Globe Corporation*. In: Proceedings of American Institute of Decision Sciences (Western Region) Conference (Kahuka Oahu, Hawaii).
- Hatcher, M.E. and T.R. Diebert, 1987, Predicting end-user acceptance of microcomputer in the workplace, *International Journal of Man-Machine Studies* 26, 695-705.

- Hill, T., N.D. Smith, and M.F. Mann, 1987. Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers, *Journal of Applied Psychology* 72, 307-313.
- Howard, G.S., 1986, *Computer anxiety and the use of microcomputers in management* (UMI Research Press, Ann Arbor, MI).
- Imam Ghozali (2008), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali (2008), *Structural Equation Modeling : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.54*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irving, R.H., C.A. Higgins, and F.R. Safayeni, 1986. *Computerize performance monitoring systems: Use and abuse*, *Communications of the ACM* 29, 794-800.
- Ives, B.I., M.H. Olson, and J.J. Baroudi, 1983, *The measurement of user satisfaction*, *Communications of the ACM* 26, 785-793.
- King, W.R. and J.I. Rodriguez, 1978, *Evaluating management information system*, *MIS Quarterly* 2, 43-51.
- Lucas, H.C., 1975, Performance and the use of an information system. *Management Science* 21, 908-919.
- Nevell, P., 1991, *an investigation of the effects of computer spreadsheets on cognitive decision behavior*, PhD thesis (The University of Queensland).
- O'Brien, G.E. and P. Humphrys, 1982, The effects of congruency between work values and perceived job attributes upon the job satisfaction of pharmacists, *Australian Journal of Psychologists* 34, 91-101.
- Pentland, B.T., 1989, *Use and productivity in personal computing: An empirical test*, in: SIM annual conference proceedings, 211-222.
- Quinn, J.B., J.J. Baruch, and P.C. Paquette, 1987, *Technology in services*, *Scientific American* 257, 24-32..
- Robey, D., 1979, User Attitudes and management information system use. *Academy of Management Journal* 22, 527-538.
- Robey, D., and R.F. Zeller, 1978, *Factors affecting the success and failure of an information system for product quality*, *Interfaces* 8, 70-75.
- Schewe, C.D., 1976, The management of the information system user. An exploratory analysis, *Academy of Management Journal* 19, 577-590.
- Spielberger, C.D., 1966, *Anxiety and behavior* (Academic Press, New York).
- Stumphf, S.A. and P.K. Dawley, 1981, Predicting voluntary and involuntary turnover using absenteeism and performance indices, *Academy of Management Journal* 24, 148-163.
- Triandis, H.C., 1980 *Values, attitudes, and interpersonal behavior*, in: *Nebraska symposium on motivation*, 1979: Beliefs, attitudes, and values (University of Nebraska, Lincoln, NE) 195-259.
- Vroom, V.H., 1964, *Work and motivation* (John Wiley and Sons, New York).
- Williamson, M.M. and P. Pence, 1989, *Wordprocessing and students writers*, in: *B.K. Britton and S.M. Glynn, eds., Computer writing environments: Theory, research, and design* (Lawrence Erlbaum Associates, NJ) 93-127.